

BAB V

KESIMPULAN

Perluasan wilayah administratif Kota Padang pada awal 1980-an menjadi salah satu titik penting dalam sejarah perkembangan ruang kota. Kebijakan ini menegaskan batas-batas baru wilayah Kota Padang, yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia di sebelah barat, Kabupaten Padang Pariaman di utara, Kabupaten Solok di timur, serta Kabupaten Pesisir Selatan di sebelah selatan. Selain memperluas cakupan wilayah administratif, kebijakan tersebut juga membawa perubahan signifikan terhadap struktur tata ruang kota, terutama dengan masuknya kawasan pinggiran dan perbukitan ke dalam wilayah perkotaan yang sebelumnya berkarakter rural.

Dampak dari perluasan wilayah tersebut terlihat dari bertambahnya jumlah kecamatan di Kota Padang, salah satunya Kecamatan Koto Tangah yang memiliki wilayah paling luas dan keragaman geografis yang tinggi. Kecamatan ini membentang dari kawasan pesisir pantai di bagian barat yang tergolong zona rawan tsunami hingga wilayah perbukitan di bagian timur yang dikenal sebagai zona aman bencana. Keanekaragaman kondisi fisik tersebut menjadikan Kecamatan Koto Tangah memiliki posisi strategis dalam perkembangan permukiman Kota Padang, terutama sebagai kawasan tujuan ekspansi hunian ke arah pinggiran kota.

Kelurahan Balai Gadang merupakan kelurahan terluas di Kecamatan Koto Tangah dan sebelum tahun 2006 memiliki karakter sosial ekonomi yang didominasi oleh kehidupan agraris. Sebagian besar masyarakat menggantungkan mata

pencapaian pada sektor pertanian sawah, ladang, dan perkebunan rakyat. Struktur sosial masyarakat relatif homogen, bercorak komunal, serta ditopang oleh nilai gotong royong yang kuat. Tanah tidak hanya berfungsi sebagai sumber ekonomi, tetapi juga memiliki makna sosial dan kultural yang erat kaitannya dengan sistem kepemilikan ulayat dalam masyarakat Minangkabau. Kehidupan ekonomi masyarakat berjalan stabil dalam skala rumah tangga, sementara aktivitas sosial banyak berpusat pada lembaga adat dan keagamaan.

Perubahan signifikan dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat Kelurahan Balai Gadang terjadi setelah peristiwa gempa bumi Sumatera Barat pada 30 September 2009. Trauma bencana serta meningkatnya kesadaran akan risiko tsunami mendorong pergeseran arah pembangunan dan permukiman Kota Padang menuju wilayah yang lebih aman, termasuk Kelurahan Balai Gadang. Arus perpindahan penduduk pascagempa menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan hunian dan mempercepat proses alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan permukiman, yang pada gilirannya mengubah struktur ekonomi dan sosial masyarakat setempat.

Pada konteks transformasi ruang tersebut, pembangunan Perumahan Villa Angrek yang telah dimulai sejak tahun 2006 menjadi salah satu titik balik penting dalam sejarah perkembangan permukiman di Kelurahan Balai Gadang. Perumahan ini berkembang menjadi kawasan hunian terbesar dan berfungsi sebagai pusat pertumbuhan permukiman baru, terutama setelah gempa 2009. Keberadaan Perumahan Villa Angrek mempercepat perubahan fungsi lahan serta menarik masuknya penduduk pendatang dengan latar belakang sosial ekonomi yang

beragam, sehingga mengubah struktur masyarakat yang sebelumnya relatif homogen menjadi lebih heterogen.

Perkembangan Kelurahan Balai Gadang tidak semata-mata disebabkan oleh keberadaan Perumahan Villa Anggrek. Munculnya berbagai perumahan lain di kawasan ini turut berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan wilayah, baik dari segi peningkatan jumlah penduduk, perkembangan infrastruktur, maupun dinamika ekonomi lokal. Meski demikian, Perumahan Villa Anggrek tetap memiliki peran yang paling dominan sebagai katalis awal dan pusat pertumbuhan utama, mengingat skala pembangunannya yang paling besar serta posisinya sebagai pelopor dalam proses transformasi kawasan tersebut.

Pembangunan Perumahan Villa Anggrek bersama dengan perkembangan perumahan lainnya memberikan dampak ganda terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat Kelurahan Balai Gadang. Di satu sisi, perkembangan ini membuka peluang ekonomi baru melalui munculnya usaha perdagangan, jasa, dan sektor informal, serta menciptakan lapangan pekerjaan di bidang konstruksi dan jasa penunjang permukiman. Di sisi lain, berkurangnya lahan pertanian mendorong pergeseran mata pencaharian masyarakat dari sektor agraris ke sektor non-agraris, yang menuntut kemampuan adaptasi sosial dan ekonomi.

Secara sosial, interaksi antara masyarakat asli dan penghuni Perumahan Villa Anggrek berlangsung relatif harmonis. Proses adaptasi berjalan secara bertahap melalui berbagai aktivitas kemasyarakatan, keagamaan, dan kegiatan ekonomi, sehingga tidak menimbulkan konflik terbuka yang berarti. Kesamaan latar belakang budaya Minangkabau antara penduduk lokal dan sebagian besar

pendatang turut mempermudah proses integrasi sosial serta menjaga keberlanjutan nilai-nilai adat dan kebersamaan dalam kehidupan masyarakat Kelurahan Balai Gadang.

Transformasi sosial ekonomi di Kelurahan Balai Gadang merupakan hasil dari proses yang kompleks dan multikausal, yang melibatkan faktor kebijakan tata ruang, dinamika pascabencana, serta perkembangan sektor perumahan secara keseluruhan. Dalam proses tersebut, Perumahan Villa Anggrek tetap dapat dipandang sebagai katalis utama yang mempercepat perubahan, sekaligus menjadi penanda awal pergeseran Kelurahan Balai Gadang dari kawasan agraris tradisional menuju kawasan permukiman urban yang dinamis sebagai bagian dari perkembangan Kota Padang pascagempa Sumatera Barat 2009.

